



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ari Gayo, Akhyar, 2009. *KESIAPAN PENGADILAN AGAMA Menerima, Memeriksa, dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Asnawi, M Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, M Yahya, 1993, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No.7 Tahun 1989*, Pustaka kartini, Jakarta
- , 2016, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Adiwarman, 2004, *Bank Islam : Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi Dua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Sulakin, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Manan, Bagir, 2007, *Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniawati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.



- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmat, Budi 2002, *Multi Finance Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Pembiayaan Konsumen*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Suadi, Amran, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,
- Tri Wahyudi, Abdullah, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (staatsblad 1847 No. 23 tentang Burgelijk wetbook vor Indonesie (BW)) Terjemahan R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.

HIR/RBg



Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2008 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara.

BUKU II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

3. Skripsi /Tesis

Qurrata Ainy, 2013 “Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul (Analisis Putusan Perkara No.0318/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, *Tesis*, Program Studi (S2) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Achmad, Kurniawan, 2016 “ Kewenangan Peradilan Agama Dalam Perkara Lelang Objek Jaminan Hak Tanggungan Atas Pembiayaan Perbankan Syariah”. *Tesis*, Program Studi (S2) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA PERKARA

HARRY GUNAWAN, Hartini, S.H., M.Si

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Agus Abdillah Ali, 2005, “ Kontribusi Hakim Peradilan Agama Dalam Proses Pembentukan Yurisprudensi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. *Skripsi*, Program Studi (S1) Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.